

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi adalah sebuah teori yang menjelaskan hubungan antara dua belah pihak yang berbeda kepentingan. Pihak pertama berperan sebagai *agent*, yakni pihak yang menjalankan kegiatan bisnis secara langsung. Selanjutnya pihak kedua berperan sebagai *principal*, yakni *stakeholder*. Kedua pihak tersebut terlibat didalam satu hubungan kontraktual dimana *principal* mendelegasikan wewenangnya kepada *agent* (manajemen) untuk menjalankan kegiatan bisnis. *Principal* juga memberikan kekuasaan kepada *agent* untuk membuat suatu keputusan strategis atas nama *principal* (Jensen and Meckling dalam Benardi dkk., 2009).

Hubungan kondusif dan harmonis antara *principal* dengan *agent* sulit tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan. Diasumsikan kedua pihak tersebut akan memaksimalkan kepentingannya masing-masing. Sehingga, salah satu pihak akan dirugikan atau akan memiliki informasi yang berbeda. Manajemen sebagai pihak internal yang menjalankan secara langsung proses bisnis perusahaan akan lebih memahami segala peristiwa dan prospek

mengenai perusahaan dibandingkan dengan pihak eksternal. Hal ini menimbulkan *gap* yakni konflik yang disebut dengan asimetri informasi. Asimetri informasi adalah sebuah keadaan dimana *agent* mempunyai informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan *principal*. Asimetri informasi dapat dibedakan menjadi dua jenis yakni:

a. *Moral Hazard*

Moral hazard dapat terjadi karena adanya pemisahan kendali. Pemisahaan kendali dilakukan karena besarnya skala perusahaan. Perusahaan bersekala besar mengakibatkan pemegang saham dan juga pihak eksternal lainnya tidak mampu untuk memonitoring secara langsung kinerja dari manajemen secara menyeluruh dan mendetail. Sehingga manajemen dapat melakukan hal-hal yang dapat merugikan *stakeholder*.

b. *Adverse selection*

Adverse selection merupakan kondisi dimana pihak internal yakni manajemen memiliki keuntungan informasi dibandingkan dengan pihak berkepentingan yang lain. Hal ini mengakibatkan *stakeholder* menjadi kurang mampu menghasilkan keputusan investasi yang lebih baik. Hal ini terjadi karena terdapat beberapa informasi yang tidak sampai kepadanya.

Berdasarkan teori tersebut maka timbulah keperluan akan pengungkapan laporan keuangan berkala oleh manajemen sebagai *agent* kepada *stakeholder* sebagai *principal*. Pengungkapan pelaporan

ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari *agent* dalam mengelola dana dari *principal*. Melalui pelaporan berkala ini *principal* akan mengetahui kegiatan usaha yang dijalankan oleh *agent*, kemudian dijadikan sebagai dasar untuk menilai kinerja manajemen. Oleh karena itu, dalam hubungan keagenan tersebut laporan keuangan merupakan sarana transparansi dan akuntabilitas manajemen (*agent*) kepada pemiliknya (*principal*). Hal tersebut juga memotivasi manajemen untuk melakukan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) yang lebih luas sebagai sarana untuk meningkatkan penilaian akan kinerja manajemen.

2. Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* merupakan teori yang menyatakan bahwa sebuah perusahaan beroperasi haruslah memberikan manfaat bagi *stakeholder*, tidak hanya untuk memenuhi kepentingan perusahaan itu sendiri. *Stakeholder* memiliki hak atas informasi perusahaan untuk memfasilitasi mereka dalam pengambilan keputusan. Sehingga memicu manajemen melaporkan kembali seluruh aktivitasnya kepada *stakeholder* diluar dari pengungkapan wajib, yakni melalui pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan ini dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan kepada *stakeholder* dan juga untuk memperoleh dukungan dari *stakeholder* demi keberlangsungan perusahaan

3. Teori Persinyalan (*Signaling Theory*)

Teori signaling menyatakan bahwa perusahaan akan memberikan sinyal mengenai keunggulan kompetitif yang dimilikinya. Keunggulan tersebut pada umumnya merupakan hal yang cukup mahal untuk ditiru oleh perusahaan lain, sehingga ketika informasi tersebut diungkap akan menunjukkan kepada pihak lain bahwa perusahaan tersebut unggul. Perusahaan akan melakukan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) yang dimana hal tersebut mampu meningkatkan minat dan mampu mempengaruhi keputusan pihak yang dituju. Manajemen melakukan pengungkapan sukarela ini untuk menunjukkan kredibilitas dan kesuksesan yang dicapai dengan sendirinya walaupun hal tersebut belum diwajibkan (Suwardjono, 2005).

4. Luas Pengungkapan

Pengungkapan adalah penyajian informasi lebih dari pengungkapan yang tertuang di dalam laporan keuangan formal (Suwardjono, 2005). Dapat diartikan bahwa laporan tahunan selain menyajikan laporan keuangan juga dapat berisi informasi mengenai perusahaan secara umum, selama informasi tersebut tidak menyesatkan penggunaannya. Tingkat pengungkapan yang dilakukan harus ditentukan terlebih dahulu. Oleh karena itu, dibutuhkan pertimbangan mengenai batas atas dan batas bawah yakni *cost and benefit* agar pengungkapan

yang dilakukan menjadi seimbang. Evans dalam Suwardjono (2005) mengelompokkan tingkat pengungkapan menjadi tiga tingkatan, yakni:

- a Tingkat memadai, yaitu jumlah minimum yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan agar tidak menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan.
- b Tingkat wajar, yaitu pengungkapan yang harus dilakukan agar seluruh pihak berkepentingan memperoleh informasi yang sama.
- c Tingkat penuh, yaitu pengungkapan yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan dari pihak yang ditargetkan agar keputusan yang diambil menjadi lebih berkualitas.

Pengungkapan yang disajikan dalam laporan tahunan harus disajikan setransparan mungkin sebagai bentuk ketaatan terhadap prinsip akuntabilitas. Informasi yang diungkapkan haruslah menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi. Sifat pengungkapan dibedakan menjadi dua golongan yakni:

- a Pengungkapan wajib (*Mandatory disclosure*)

Pengungkapan wajib adalah pengungkapan yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan atau entitas karena telah ditetapkan didalam peraturan yang diterbitkan oleh lembaga berwenang, dalam hal ini adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) dan juga PSAK. Pengungkapan wajib meliputi *statemen* keuangan, catatan atas *statemen* keuangan dan informasi pelengkap (Suwardjono, 2005).

b Pengungkapan sukarela (*Voluntary disclosure*)

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan selain dengan apa yang telah diwajibkan oleh Bapepam LK dan PSAK. Pengungkapan sukarela meliputi sarana pelaporan keuangan lain dan informasi lainnya (Suwardjono, 2005).

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi luas *voluntary disclosure* telah banyak dilakukan. Sehingga penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sebagai pembandingan dan juga bahan referensi. Berikut beberapa penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi luas *voluntary disclosure*.

Indriani dkk., (2014) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan sukarela pada laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Variabel independen pada penelitian tersebut adalah porsi kepemilikan saham publik, umur *listing*, likuiditas, dan ukuran KAP. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa hanya variabel porsi kepemilikan saham publik saja yang berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela. Artinya, semakin banyak kepemilikan saham publik maka semakin luas pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh

perusahaan. Sedangkan variabel independen lainnya tidak mempengaruhi luas pengungkapan sukarela secara signifikan.

Wardani (2012) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan sukarela pada laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di BEI. Ukuran perusahaan, leverage, porsi kepemilikan, likuiditas, profitabilitas, dan umur perusahaan merupakan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Dari 79 sampel perusahaan yang diteliti terbukti bahwa umur listing, ukuran dan profitabilitas perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Sedangkan variabel lainnya yaitu kepemilikan publik, likuiditas dan leverage tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela.

Suta dan Laksito (2012) juga melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan sukarela pada laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Faktor yang diteliti yakni ukuran, umur, leverage, kepemilikan publik, profitabilitas yang diproksikan dengan *net profit margin* dan ROE, likuiditas dan proporsi dewan kominsaris independen. Dari kedelapan variabel independen yang diuji, terbukti bahwa hanya variabel likuiditas, ukuran perusahaan dan leverage yang berberpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela.

Benardi dkk., (2009) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan dan implikasinya terhadap asimetri informasi pada perusahaan sektor manufaktur yang *go publik* di BEI. Faktor

yang diteliti yaitu ukuran perusahaan, *leverage*, porsi kepemilikan saham publik, likuiditas, profitabilitas, ukuran KAP, dan *scope* bisnis. Dari kedelapan variabel independen yang diteliti diperoleh hasil bahwa hanya variabel ukuran perusahaan, ukuran KAP, dan *scope* bisnis yang berpengaruh positif signifikan terhadap luas *voluntary disclosure*.

C. Penurunan Hipotesis

1. Kepemilikan Publik dan Luas *Voluntary Disclosure*.

Kepemilikan saham oleh publik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi luas *voluntary disclosure*. Kepemilikan saham publik adalah sejumlah saham yang dimiliki oleh publik atau masyarakat. Berdasarkan teori *stakeholder*, pemegang saham publik merupakan bagian dari *stakeholder* yang memiliki kepentingan atas laporan keuangan yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Dimana perusahaan beroperasi haruslah memberikan manfaat bagi *stakeholder*, tidak hanya untuk memenuhi kepentingan perusahaan itu sendiri. Sehingga laporan keuangan tahunan yang disajikan merupakan sarana untuk melakukan analisis prospek perusahaan dan untuk menilai kinerja manajemen bagi pemegang saham. Pemegang saham akan menuntut perusahaan mengungkapkan butir informasi seluas mungkin dalam laporan tahunan untuk memfasilitasi kebutuhannya menganalisis imbal hasil dan menjamin rasa aman dari investasi yang ditanamkannya. Sehingga dengan semakin banyaknya pemegang saham publik maka

kebutuhan akan pengungkapan informasi akan semakin luas. Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan yang lebih komprehensif lagi di dalam laporan tahunannya. Dimana dasar perlunya praktik pengungkapan laporan keuangan oleh manajemen kepada pemegang saham dapat dijelaskan melalui teori keagenan. Langkah ini dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisir adanya asimetri informasi yang terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Pancawati (2008) dan Indriani dkk (2014) membuktikan bahwa porsi kepemilikan saham publik berpengaruh terhadap luas *voluntary disclosure*. Dimana semakin banyaknya pemegang saham, kebutuhan akan informasi yang harus diungkap akan semakin luas dalam hal ini berkaitan dengan *voluntary disclosure*. Sehingga berdasarkan uraian tersebut dapat diturunkan hipotesis pertama sebagai berikut:

H₁: Kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap luas *voluntary disclosure*

2. Umur *Listing* dan Luas *Voluntary Disclosure*.

Umur *listing* adalah faktor yang menentukan keberlangsungan dari sebuah perusahaan. Hal ini karena umur *listing* menunjukkan lamanya sebuah perusahaan terdaftar sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia (BEI). Semakin lamanya sebuah perusahaan *listing* di BEI maka diasumsikan perusahaan tersebut akan memiliki

pengalaman yang lebih mendalam mengenai seluk beluk pembuatan laporan dan pempublikasiannya. Sehingga berdasarkan *signaling theory*, perusahaan tersebut akan meningkatkan praktek-praktek pelaporannya dari tahun ke tahun yang kemudian membuat pengungkapan yang dilakukan akan semakin luas untuk menjaga reputasinya. Selain itu hal ini dilakukan oleh perusahaan juga sebagai bentuk kepatuhan mengenai praktik akuntabilitas kepada Bapepam LK.

Penelitian mengenai pengaruh umur listing terhadap luas *voluntary disclosure* telah dibuktikan oleh beberapa peneliti terdahulu. Wardani (2012), dan Aulya dan Sutono (2015) yang menyatakan bahwa umur listing berpengaruh positif terhadap luas *voluntary disclosure*. Artinya semakin lama perusahaan terdaftar sebagai perusahaan publik, maka kebutuhan informasi akan semakin besar sehingga semakin luas *voluntary disclosure* yang dilakukan perusahaan. Sehingga dapat diturunkan hipotesis kedua adalah sebagai berikut:

H₂: Umur *listing* berpengaruh positif terhadap luas *voluntary disclosure*

3. Likuiditas dan Luas *Voluntary Disclosure*.

Likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi segala kewajiban jangka pendek dengan asset yang dimilikinya. Likuiditas merupakan aspek pengukuran kinerja yang menjadi salah satu pusat perhatian dari para pengguna informasi

sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan investasi. Tingkat likuiditas yang tinggi dianggap merupakan sinyal bahwa perusahaan akan mampu memberikan imbal hasil atas investasi yang ditanamkan di dalamnya sesuai dengan perjanjian. Sehingga perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas tinggi akan lebih dipilih oleh investor.

Berdasarkan teori signaling perusahaan akan memberikan *good news* kepada pihak eksternal sebagai salah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Tingkat likuiditas yang tinggi merupakan sebuah prestasi yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini karena likuiditas yang tinggi mencerminkan kondisi keuangan yang kuat dan merupakan keberhasilan manajemen dalam mengelola keuangan. Oleh karenanya, perusahaan dengan likuiditas yang tinggi akan cenderung melakukan *voluntary disclosure* yang lebih luas. Hubungan ini telah dibuktikan oleh hasil penelitian yang dilakukan Kartika (2009) dan Suta dan Laksito (2012) yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap luas *voluntary disclosure*. Sehingga hipotesis ketiga adalah sebagai berikut:

H₃: Likuiditas berpengaruh positif terhadap luas *voluntary disclosure*

4. Ukuran KAP dan Luas *Voluntary Disclosure*.

Berdasarkan *agency theory* terdapat perbedaan kepentingan antara *stakeholder* dengan manajemen. Adanya *agency theory* ini membuat *stakeholder* selaku *principal* akan menekankan kualitas audit atas laporan perusahaan yang merupakan sarana untuk mengawasi kinerja manajemen (Indraswari, 2010). Hal tersebut membuat kebutuhan atas jasa profesi Akuntan Publik untuk menilai laporan yang telah disajikan oleh manajemen menjadi penting. Hasil penilaian dari Akuntan Publik yang bernaung pada Kantor Akuntan Publik (KAP) anggota maupun afiliasi *Big Four* akan memperoleh kepercayaan yang lebih tinggi dari para pengguna laporan keuangan dibandingkan KAP *non big four*. Dimana KAP *big four* sudah memiliki reputasi yang baik dengan sumber daya yang lebih berkualitas sehingga diharapkan lebih ahli dalam mengidentifikasi kesalahan akuntansi yang terjadi dalam laporan tahunan yang disajikan manajemen (Nancy, 2012).

Hasil audit berperan penting dalam menentukan strategi pelaporan dari perusahaan. Hasil audit yang berkualitas akan membuat laporan keuangan tahunan perusahaan menjadi lebih transparan dan sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada. Hasil penelitian yang diperoleh Benardi dkk., (2009) dan Nancy (2012) menyatakan bahwa ukuran KAP berpengaruh positif signifikan terhadap luas *voluntary disclosure*. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis keempat adalah sebagai berikut:

H4: Ukuran KAP berpengaruh positif terhadap luas *voluntary disclosure*

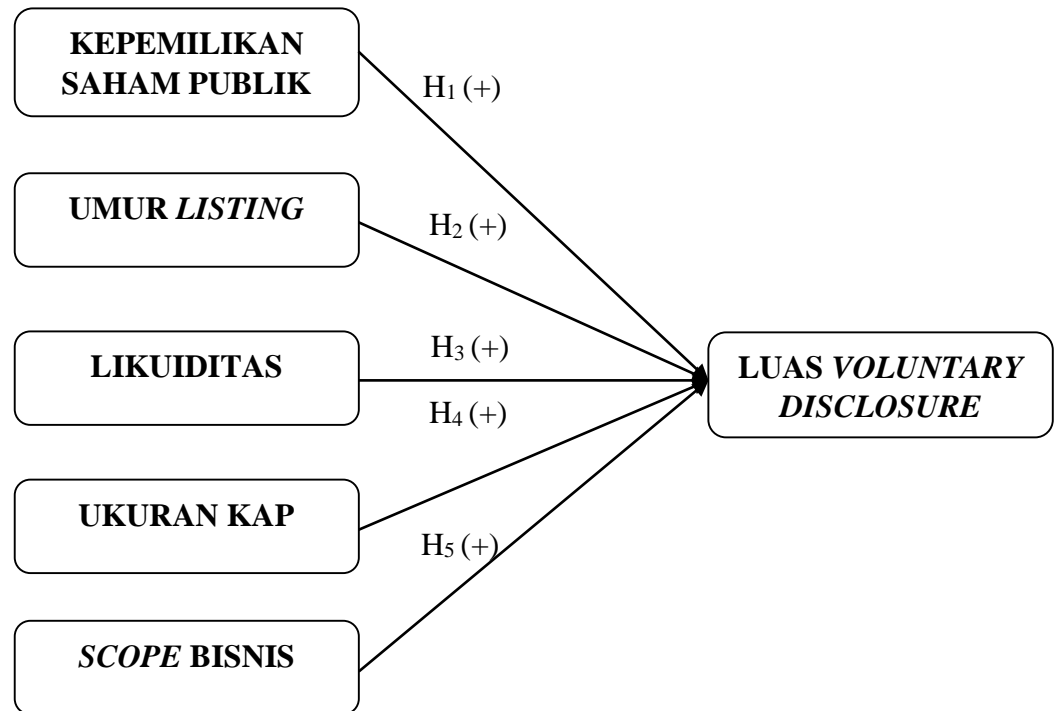
5. *Scope Bisnis dan Luas Voluntary Disclosure.*

Benardi dkk., (2009) menyatakan bahwa *scope* (lingkup) bisnis secara umum terbagi menjadi perusahaan konglomerat dan perusahaan non konglomerat. Dimana pengertian dari perusahaan konglomerat adalah perusahaan yang *scope* bisnisnya lebih luas karena terdiri dari beberapa bidang atau jenis usaha. Berbeda dengan perusahaan non konglomerat, perusahaan ini hanya terdiri dari satu bidang usaha, sehingga lingkup bisnisnya menjadi lebih sempit.

Benardi dkk., (2009) telah membuktikan bahwa perusahaan konglomerat akan melakukan pengungkapan yang lebih luas dibandingkan perusahaan non konglomerat. Hal ini karena perusahaan konglomerat yang lingkup bisnisnya luas akan memperoleh tekanan yang lebih tinggi untuk melakukan pengungkapan dari stakeholder dan juga regulasi. Hal tersebut sejalan dengan teori *stakeholder* dimana perusahaan haruslah memenuhi kehendak dari *stakeholder* dan tidak hanya untuk kepentingan perusahaan itu sendiri. Hal tersebut dilakukan agar memperoleh dukungan dari stakeholdernya demi keberlangsungan perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis kelima adalah sebagai berikut:

H₅: *Scope* bisnis berpengaruh positif terhadap luas *voluntary disclosure*.

D. Model Penelitian



Sumber: Olahan peneliti.

GAMBAR 2.1

Model Penelitian

